

Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Jayapura

Yuniar Sri Hartati

Dosen Ekonomi Pembangunan, STIE Port Numbay Jayapura

Abstract: The research conducted has the aim of looking at the base sector in Jayapura Regency every year, namely from 2012 – 2015. This research is research that is expected to provide an empirical contribution to the analysis of leading sectors in Jayapura Regency, as input for policy makers related to the development of Jayapura Regency in the context of further development programs while maintaining existing economic growth, and can be used as reference material for any party interested in conducting research related to this study. The results of the study show that from 2012 -2015 the LQ in each economic sector in Jayapura Regency shows that the basic sectors are Agriculture, Forestry and Fisheries, Processing Industry Sector, Electricity and Gas Procurement Sector, Water Supply Sector, Waste Management, Waste and Recycling, Wholesale and Retail Trade Sector, Transportation and Warehousing Sector, Accommodation and Food and Drink Provision Sector, Information and Communication Sector, Real Estate Sector, Corporate Services Sector, Government Administration Sector, Land and Compulsory Social Security, Education Services Sector, Services Sector Health and Social Activities, and Other Services Sector.

Keywords: Leading Sector, Economic Growth

Abstrak: Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk melihat sektor basis di Kabupaten Jayapura disetiap tahunnya, yaitu dari tahun 2012 – 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris pada analisis sektor unggulan di Kabupaten Jayapura, menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Jayapura dalam rangka program pembangunan selanjutnya dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada, serta dapat sebagai bahan referensi bagi pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang terkait dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2012 -2015 LQ pada setiap sektor ekonomi di Kabupaten Jayapura terlihat bahwa yang menjadi sektor basis adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya.

Kata Kunci : *Sektor Unggulan, Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008).

Pada saat proses pembangunan ekonomi baru di mulai tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*) sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara maju) maka perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (*convergence*).

Dalam lima tahun terakhir berbagai langkah strategis dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Jayapura tercantum yang termuat dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode 2011-2015 berisi akan melakukan pengembanaan sektor basis seperti pertanian, sampai dengan jasa-jasa dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan investasi serta perbaikan infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai strategi pemerintah daerah dalam hal pembangunan sebagaimana yang dimaksud Arsyad (1999:108) dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru merangsang perkembangan ekonomi wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai barometer Pembangunan

Ekonomi Daerah Kabupaten Jayapura dan juga sebagai Indikator Makro Ekonomi yang mengukur produktivitas faktor produksi dalam melakukan transformasi berbagai sumberdaya yang tersedia (sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya finansial) dalam proses produksi yang dapat menciptakan pendapatan.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura melalui pengembangan setiap sektor dengan mendahulukan sektor unggulan yang dikembangkan melalui kebijakan pemerintah daerah dengan cara pemanfaatan sepenuhnya sumber daya alam yang dimiliki berdasar kan kehasan masing-masing pembangunan ideal jika usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah berdampak langsung pada sembilan sektor dilihat dari sektor unggulan di Kabupaten Jayapura dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak 2012-2015 terjadi perkembangan dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah adalah : “Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Jayapura dari tahun 2012-2015?”

Sedangkan manfaat/kegunaan penelitian ini berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan, yaitu :

1. Memberikan kontribusi empiris pada analisis sektor unggulan di Kabupaten Jayapura.
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Jayapura dalam rangka program pembangunan selanjutnya dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang terkait dengan kajian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah

faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB, yakni :

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) lapangan usaha (sektor) yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (17) Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/*entrepreneurship*), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit, (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan Inventori/stok, (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Dalam pendekatan ini tidak dijelaskan tentang kepemilikan faktor produksi, apakah milik penduduk wilayah tersebut atau bukan.

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah di mana sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah;
4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri;

5. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi;
6. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri;
7. PDRB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk secara rata-rata;
8. PDRB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penyelesaian factor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka menengah, dan penyelesaian mengenai bagaimana factor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boedionon, 1999). Sehingga presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka menengah bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.

Beberapa pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan analisis sector unggulan. Para pakar ekonomi membedakan kedua pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu Produk Domestik Regional Bruto/ Produk Nasional Bruto pada suatu tahun tertentu dibagi dengan sektor PDRB penduduk. Atau Perkembangan Produk Domestik Bruto yang terjadi dalam suatu Negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonomi (trasformasi astruktural). Sedangkan sektor unggulan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto / Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat sektor unggulan penduduk, atau apakah peluasan sector ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad 1999).

Menurut Kuznets dalam jhingan (2002) sector ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu Negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor-faktor penting (Arsyad, 1999) seperti akumulasi modal yang merupakan semua investasi baru terwujud tanah (Lahan) Peralatan fiskal dan sumber daya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung akan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumber daya – sumber daya yang telah ada. Kemudian pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja yang secara produktif. Faktor-faktor tersebut, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Menurut Arsyad (1999) ada perbedaan antara pembangunan ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi. Para pakar ekonomi seperti kaum merkantilisme, klasik sampai Keynes membedakan kedua pengertian tersebut yaitu : (a) peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan PDB/PNB pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk, dan, (b). perkembangan PDB/PNB yang terjadi dalam suatu Negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi ekonomi). Dalam rangka melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun akan melihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau indeks harga konsumen secara berkala, yaitu pertumbuhan yang positif akan menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya negatif akan menunjukkan penurunan perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri dari 9 (Sembilan) sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan pengalihan, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Kuznets (Todaro, 2000) juga menemukan enam karakteristik atau ciri proses sektor ekonomi yaitu, tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kenaikan total produktifitas yang tinggi, khususnya produktifitas tenaga kerja. Kemudian tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi dan tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi juga merupakan ciri proses sektor ekonomi. Selain itu adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.

3. Sektor Ekonomi Unggulan (Sektor Basis)

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan

daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000).

Glason (1978) dalam Sirojuzilam (2010) menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas basis adalah aktivitas-aktivitas yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian wilayah yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan aktivitas-aktivitas non basis adalah aktivitas-aktivitas yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas. Basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. Salah satu cara dalam menentukan suatu sektor sebagai sektor basis atau non-basis adalah analisis *Location Quotient* (LQ).

Arsyad (1999) menjelaskan bahwa teknik *Location Quotient* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).
2. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah teknik yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk

mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (*leading sector*). Indikator yang digunakan kesempatan kerja (tenga kerja) dan *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) Suatu Wilayah.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dengan alasan Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten yang terdekat dengan pusat pemerintahan di Provinsi Papua sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam pembangunan, perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan bagi daerah lainnya.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan serupa data sekunder yang bersumber dari dokumen PDRB Kabupaten Jayapura sebagai wilayah inti dan PDRB Provinsi Papua sebagai wilayah pembanding. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2010 di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua dalam kurun waktu 2012-2015.

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan dari penelitian ini dan disesuaikan dengan teori-teori dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan dengan analisis kuantitatif menjelaskan berdasarkan data-data. Salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor apa yang menjadi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Jayapura.

Untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Jayapura digunakan alat analisis ekonomi regional yaitu Analisis *Location Quotient* (LQ).

Apabila sektor memiliki nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang berpotensi untuk diandalkan sebagai pengekspor ke daerah lain dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Sebaliknya jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan sektor unggulan, atau dengan kata lain daerah tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut (Arsyad, 1999: 154) :

$$LQ = \frac{Xir / PDRBr}{Xin / PDRBn}$$

Keterangan :

LQ = Koefisien Location q;
Xir = nilai tambah sektor i di Kota Jayapura;
PDRBr = PDRB Kota Jayapura;
Xin = nilai tambah sektor i di Provinsi Papua;
PDRBn = PDRB Provinsi Papua.

Definisi Operasional

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto yang digunakan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun dasar 2010. Menggunakan Data PDRB atas dasar harga berlaku sebagai alat mengukur produktivitas daerah yang diduga dapat menjadi potensi dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah di Kabupaten Jayapura .

2. Sektor Basis

Sektor Unggulan (Sektor Basis), yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor basis mampu menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Itu berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah

sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor/komoditas dikatakan sebagai sektor/komoditas unggulan wilayah. Salah satunya adalah dengan mengamati apakah sektor/komoditas tersebut bisa menjadi basis perekonomian wilayah. Jika menjadi basis maka diindikasikan sektor/wilayah tersebut mempunyai kapasitas *output bruto* yang diperlukan untuk mempertahankan produksi perekonomian wilayah dan memenuhi pertambahan *final demand*. Sektor/komoditi yang mampu memenuhi dan menopang kelangsungan produksi wilayah dengan tinggi serta dapat memenuhi *final demand* dikategorikan sebagai sektor/komoditi unggulan dan menjadi basis perekonomian wilayah.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (*Location Quotient*), yaitu suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peran suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya. Dalam literatur perekonomian wilayah disebutkan bahwa suatu sektor yang memiliki angka LQ di atas 1 (satu) maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah bersangkutan. Sebaliknya jika LQ suatu sektor di bawah 1 (satu) maka sektor tersebut hanya akan menjadi pengimpor.

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 – 2015 (Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.374.127,60	1.374.127,59	1.501.834,43	1.688.588,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	173.452,50	173.452,50	173.843,03	175.035,18
3.	Industri Pengolahan	325.451,60	328.914,56	334.952,20	365.006,95
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.245,50	2.245,53	334.952,20	365.006,95
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.200,00	11.200,00	12.011,74	13.054,96
6.	Konstruksi	546.945,40	546.945,43	650.016,02	772.390,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	760.065,90	828.654,40	889.702,30	950.933,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	778.412,50	875.256,80	963.987,20	1.060.914,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67.785,70	77.799,40	88.613,70	100.666,80
10.	Informasi dan Komunikasi	297.499,40	334.579,20	371.256,60	405.212,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	72.142,50	83.403,40	95.944,00	104.579,30
12.	Real Estate	252.023,00	289.956,20	314.084,70	340.405,00

13.	Jasa Perusahaan	93.469,70	109.062,50	130.309,40	150.272,80
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	465.710,20	488.339,10	563.052,80	604.030,40
15.	Jasa Pendidikan	115.911,00	135.625,10	148.529,60	159.269,50
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.862,80	96.011,20	104.768,30	113.820,30
17.	Jasa Lainnya	94.933,10	106.268,80	116.313,00	125.176,00
Total PDRB		5.522.701,20	6.086.192,70	6.771.410,30	7.447.051,00

Sumber : BPS Kabupaten Jayapura, 2016

Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 – 2015 (Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.883,70	13.661,80	14.453,15	15.425,25
2.	Pertambangan dan Penggalan	46.801,23	51.011,15	49.649,17	53.506,28
3.	Industri Pengolahan	2.251,71	2.299,67	2.500,13	2.594,41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	35,58	38,23	40,62	38,93
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61,33	65,34	69,42	72,19
6.	Konstruksi	10.546,59	11.790,56	12.800,12	14.169,45
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	8.258,63	9.031,48	9.690,71	10.490,34
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.201,65	4.543,95	5.010,28	5.487,69
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	656,52	733,11	825,28	887,32
10.	Informasi dan Komunikasi	3.785,42	4.269,71	4.553,00	4.789,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.516,70	1.727,31	1.852,79	1.901,45
12.	Real Estate	2.434,58	2.718,62	2.938,68	3.100,77
13.	Jasa Perusahaan	1.228,63	1.300,92	1.426,42	1.482,99
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.506,34	8.744,15	10.140,12	11.258,74
15.	Jasa Pendidikan	2.129,57	2.337,13	2.527,72	2.710,79
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.526,90	1.668,80	1.824,99	1.977,55
17.	Jasa Lainnya	1.065,85	1.176,89	1.277,53	1.367,46
Total PDRB		107.890,93	117.118,82	121.580,13	131.270,88

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jayapura sebagai wilayah studi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua sebagai wilayah acuan menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian yang terdapat dalam PDRB mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sehingga hampir semua sektor perekonomian dapat menjadi sektor basis (sektor unggulan), yang mana dapat tercerminkan sebagai berikut:

- Jika nilai LQ sektor i (LQ_i) lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Maka sektor i merupakan

sektor basis di daerah studi pada periode tahun pengamatan.

- Jika nilai LQ sektor i lebih kecil dari 1 ($LQ < 1$), maka sektor i merupakan sektor non basis di daerah studi tersebut. Artinya daerah tersebut kekurangan produksi yang dihasilkan oleh sektor i , sehingga harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain jika pola komunikasi di daerah itu ingin dipertahankan.

Tabel 3. LOCATION QUOTIENT (LQ) Tahun 2012 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,08	1,94	1,87	1,93
2.	Pertambangan dan Penggalan	0,07	0,07	0,06	0,06
3.	Industri Pengolahan	2,82	2,75	2,41	2,48

4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,23	1,13	1,07	1,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,57	3,30	3,11	3,19
6.	Konstruksi	1,01	0,89	0,91	0,96
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	1,80	1,77	1,65	1,60
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,62	3,71	3,45	3,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,02	2,04	1,93	2,00
10.	Informasi dan Komunikasi	1,54	1,51	1,46	1,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	0,93	0,93	0,97
12.	Real Estate	2,02	2,05	1,92	1,93
13.	Jasa Perusahaan	1,49	1,61	1,64	1,79
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,07	1,00	0,95
15.	Jasa Pendidikan	1,06	1,12	1,06	1,04
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,11	1,03	1,01
17.	Jasa Lainnya	1,74	1,74	1,63	1,61
Total PDRB		29,20	28,73	27,12	27,56

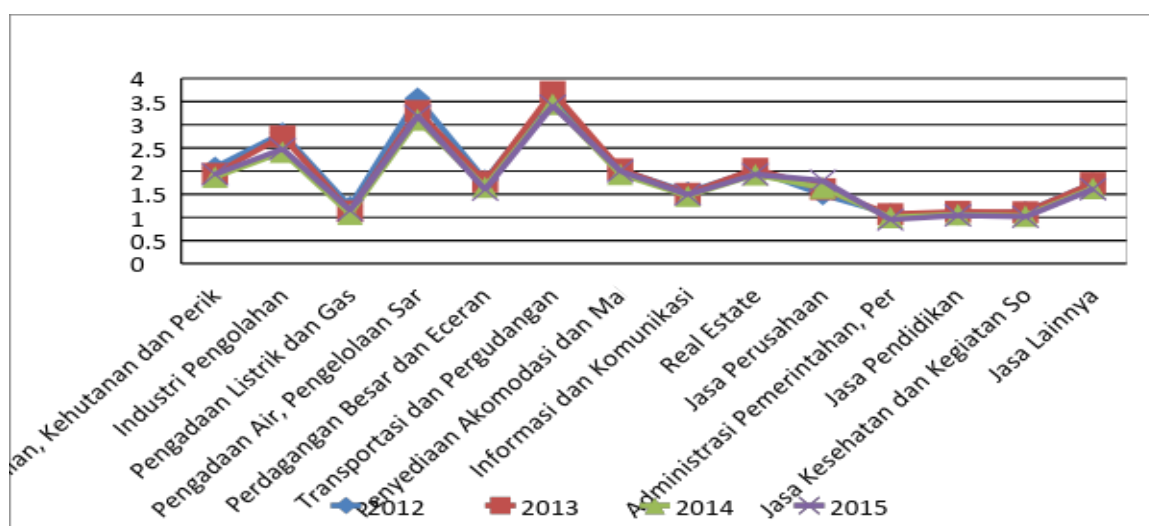
Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan besar kecilnya nilai LQ tahun 2012 – 2015 pada setiap sektor ekonomi Kabupaten Jayapura terlihat bahwa yang menjadi sektor basis adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya.

Berikut gambar pergerakan sektor unggulan yang terjadi di Kabupaten Jayapura selama kurun waktu 2012 – 2015 :

Gambar 2.
Pergerakan Sektor Basis/Unggulan Di Kabupaten Jayapura 2012 – 2015



PENUTUP

Berdasarkan besar kecilnya nilai LQ tahun 2012 - 2015 pada setiap sektor ekonomi Kabupaten Jayapura terlihat bahwa yang

menjadi sektor basis terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2012 sebesar 2,08, Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2012 sebesar 2,82,

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2012 sebesar 1,23, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2012 sebesar 3,57, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2012 sebesar 1,80, Sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2013 sebesar 3,71, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2013 sebesar 2,04, Sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2012 sebesar 1,54, Sektor Real Estate pada tahun 2013 sebesar 2,05, Sektor Jasa Perusahaan pada tahun 2015 sebesar 1,79, Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2013 sebesar 1,07, Sektor Jasa Pendidikan pada tahun 2013 sebesar 1,12, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2012 sebesar 1,12, dan Sektor Jasa Lainnya pada tahun 2013 sebesar 1,74.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu*,Yokjakarta
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE,Yokjakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi 4. Penerbit Erlangga.Jakarta.
- Marizka. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Natahiddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daeral di Propinsi Jambi*, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP YKPN.
- Nazara, Suahasil. 1994. *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia*. Prisma No.8. LP3ES. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Singgih, Santoso, 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Tarigan, R., 2007.*Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, M. and Smith, S. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi ke Delapan,Jakarta: Erlangga.
- Todaro M.P, 2000, *Economic Development*, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman. Inc.
- _____, Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.